



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 semula Rp. 609.302.360.536,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 12.890.811.858,99 sehingga menjadi Rp 622.193.172.394,99 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	582.302.360.536,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(10.920.113.697,00)</u>	
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp		571.382.246.839,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	609.302.360.536,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.890.811.858,99</u>	
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp		622.193.172.394,99

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	27.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>23.810.925.555,99</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 50.810.925.555,99

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp -

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 50.810.925.555,99

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah

1) Semula	Rp	91.298.856.536,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(3.423.553.255,00)</u>

Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp 87.875.303.281,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp	483.523.504.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(8.497.309.642,00)</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 475.026.194.358,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp	7.480.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.000.749.200,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 8.480.749.200,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp	9.660.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(1.655.500.000,00)</u>

Jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 8.004.500.000,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp	5.040.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>414.170.000,00</u>

Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp 5.454.170.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp	6.401.856.536,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(1.044.974.055,00)</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 5.356.882.481,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;			
1) Semula	Rp	70.197.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(1.137.249.200,00)</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp		69.059.750.800,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Transfer pemerintah pusat			
1) Semula	Rp	454.523.504.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(13.778.645.246,00)</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp		440.744.858.754,00
b. Transfer antar Daerah			
1) Semula	Rp	29.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>5.281.335.604,00</u>	
Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp		34.281.335.604,00
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp		-
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp		-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	7.480.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>1.000.749.200,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		8.480.749.200,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;			
1) Semula	Rp	537.299.563.908,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>7.950.360.269,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp		545.249.924.177,00
b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp	70.002.796.628,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>2.440.451.590,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		72.443.248.218,00
c. Belanja tidak terduga;			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		4.500.000.000,00

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan			Rp -

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	296.409.595.489,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(10.600.498.370,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 285.809.097.119,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	232.475.835.689,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>17.840.908.639,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 250.316.744.328,00

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp -

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp -

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp	6.397.900.730,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>941.150.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp 7.339.050.730,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	2.016.232.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(231.200.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 1.785.032.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	21.381.987.112,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>320.590.550,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp 21.702.577.662,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	17.316.680.100,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>5.505.080.500,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp 22.821.760.600,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1) Semula	Rp	12.406.548.133,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>770.587.996,00</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp	13.177.136.129,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
1) Semula	Rp	17.664.925.833,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(5.762.083.653,00)</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp	11.902.842.180,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp	1.232.655.450,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>1.606.276.197,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp	2.838.931.647,00
f. belanja modal aset tidak berwujud			
1) Semula	Rp		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		Rp	
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp	2.000.000.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp	4.500.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp	
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp	

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	27.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>23.810.925.555,99</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp	50.810.925.555,99
b. Pengeluaran Pembiayaan.			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp	-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	27.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>23.810.925.555,99</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp		50.810.925.555,99

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp		-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	

Jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan Rp -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah  
setelah perubahan Rp -

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah  
perubahan Rp -

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp -

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>	

Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp -



c. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Jatuh Tempo

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Jatuh Tempo setelah perubahan		Rp -

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-
Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp -

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp -

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - a. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - b. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berjalan;
  - c. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- d. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang  
Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; dan  
Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai  
landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA  
BARAT (3/85/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan bagian dari mekanisme penganggaran Daerah. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menjelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa alasan sebagai berikut : (1) apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) keadaan darurat; dan (5) keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD meliputi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan asumsi pendapatan yaitu adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penyaluran transfer ke Daerah dan dana desa tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

Berbagai regulasi yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan tentunya berdampak terhadap prioritas belanja Daerah. Hal itu tercermin terakhir dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan Nomor SE-2/MK.07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya, dimana Daerah diminta melakukan penyesuaian belanja untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020, terdapat nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang tidak sama dengan asumsi awal.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

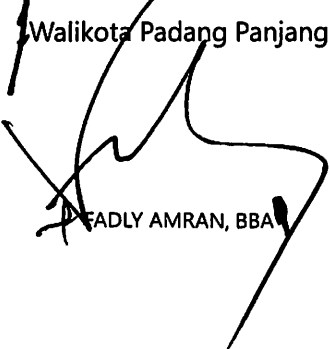
Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

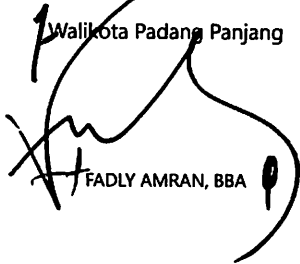
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	27.000.000.000	50.810.925.556	23.810.925.556	88 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Walikota Padang Panjang  
  
DEADLY AMRAN, BBA



7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	0	18.947.967.244	0	0	0	18.947.967.244	0	18.525.076.162	43.732.850	0	0	18.568.809.012
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	0	19.506.682.934	1.100.000	0	0	19.507.782.934	0	19.863.527.058	132.000.000	0	0	19.995.527.058
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	1.583.495.230	0	0	0	1.583.495.230	0	2.327.657.930	0	0	0	2.327.657.930
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	1.583.495.230	0	0	0	1.583.495.230	0	2.327.657.930	0	0	0	2.327.657.930
8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	0	1.583.495.230	0	0	0	1.583.495.230	0	2.327.657.930	0	0	0	2.327.657.930
TOTAL				582.302.360.536	537.299.563.908	70.002.796.628	2.000.000.000	0	609.302.360.536	571.382.246.839	545.249.924.177	72.443.248.218	4.500.000.000	0	622.193.172.395

Walikota Padang Panjang



FADLY AMRAN, BBA



Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.1.02.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	1.01.2.22.1.02.01.0000	02	2.03	00					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.055.000	80.055.000	0	
2	22	1.01.2.22.1.02.01.0000	02	2.03	02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	80.055.000	80.055.000	0	
2	22	1.01.2.22.1.02.01.0000	02	2.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	80.055.000	80.055.000	0	
2	22	1.01.2.22.1.02.01.0000	02	2.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	80.055.000	80.055.000	0	
Jumlah Belanja											109.697.849.641	109.774.786.586	76.936.945	
Total Surplus/(Defisit)											(109.696.449.641)	(109.772.286.586)	(75.836.945)	
0	00	1.01.2.22.1.02.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Wakil Kota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA



Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG													
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021													
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN													
Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.652.000	29.468.000	13.816.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	392.610.000	436.038.500	43.428.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	392.610.000	436.038.500	43.428.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	392.610.000	436.038.500	43.428.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.549.440	40.549.440	4.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	36.549.440	40.549.440	4.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.549.440	40.549.440	4.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.10	00				Peningkatan Pelayanan BLUD	57.200.000.000	57.485.907.430	285.907.430	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.10	01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	57.200.000.000	57.485.907.430	285.907.430	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.10	01	5	1		BELANJA OPERASI	55.983.800.000	55.407.707.430	(576.092.570)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.10	01	5	1	01	Belanja Pegawai	23.080.000.000	23.080.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.10	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.903.800.000	32.327.707.430	(576.092.570)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.10	01	5	2		BELANJA MODAL	1.216.200.000	2.078.200.000	862.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.10	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	916.200.000	1.615.200.000	699.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.10	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000	463.000.000	163.000.000	
Jumlah Belanja									149.492.672.951	159.780.736.437	10.288.063.486		
Total Surplus/(Defisit)									(89.035.672.951)	(99.323.736.437)	(10.288.063.486)		
0	00	1.02.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

Walikota Padang Panjang

FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.996.000	103.660.000	(16.336.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	119.996.000	103.660.000	(16.336.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	119.996.000	103.660.000	(16.336.000)	
Jumlah Belanja											36.991.353.606	31.379.255.990	(5.612.097.616)	
Total Surplus/(Defisit)											(36.591.353.606)	(30.979.255.990)	5.612.097.616	
0	00	1.03.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG												
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021												
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.387.500	47.727.500	(26.660.000)	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.638.514.725	7.085.503.290	(553.011.435)	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	00			Pengelolaan Sampah	7.638.514.725	7.085.503.290	(553.011.435)	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	03			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.329.934.725	6.898.952.760	(430.981.965)	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	7.329.934.725	6.898.302.760	(431.631.965)	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	1 01	Belanja Pegawai	3.830.000	2.180.000	(1.650.000)	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.326.104.725	6.896.122.760	(429.981.965)	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	2	BELANJA MODAL	0	650.000	650.000	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	650.000	650.000	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	05			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	308.580.000	186.550.530	(122.029.470)	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	158.580.000	186.550.530	27.970.530	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	05	5	1 01	Belanja Pegawai	2.580.000	0	(2.580.000)	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000	186.550.530	30.550.530	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	05	5	2	BELANJA MODAL	150.000.000	0	(150.000.000)	
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	05	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000	0	(150.000.000)	
Jumlah Belanja									17.160.868.387	16.624.726.614	(536.141.773)	
Total Surplus/(Defisit)									(16.825.868.387)	(16.209.726.614)	616.141.773	
0	00	1.04.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

Walikota Padang Panjang

FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  
Organisasi : 1.06.2.08.2.14.01 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	03	2.03	06	5	1			BELANJA OPERASI	19.859.000	19.859.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	03	2.03	06	5	1	01		Belanja Pegawai	3.380.000	3.380.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	03	2.03	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.479.000	16.479.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	03	2.03	06	5	2			BELANJA MODAL	187.340.000	187.340.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	03	2.03	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.340.000	187.340.000	0	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	03	2.04	00					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	101.408.000	101.408.000	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	03	2.04	03					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	0	101.408.000	101.408.000	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	03	2.04	03	5	1			BELANJA OPERASI	0	101.408.000	101.408.000	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	03	2.04	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	101.408.000	101.408.000	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	04	0.00	00					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	172.683.708	167.977.700	(4.706.008)	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	04	2.01	00					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	172.683.708	167.977.700	(4.706.008)	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	04	2.01	08					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	172.683.708	167.977.700	(4.706.008)	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	04	2.01	08	5	1			BELANJA OPERASI	172.683.708	167.977.700	(4.706.008)	
2	14	1.06.2.08.2.14.01.00	04	2.01	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	172.683.708	167.977.700	(4.706.008)	
Jumlah Belanja											11.228.118.378	11.060.529.830	(167.588.548)	
Total Surplus/(Defisit)											(11.228.118.378)	(11.060.529.830)	167.588.548	
0	00	1.06.2.08.2.14.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  
Organisasi : 2.07.2.18.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.846.250	43.846.250	0	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	43.846.250	43.846.250	0	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	43.846.250	43.846.250	0	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.960.428	151.960.428	0	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	151.960.428	151.960.428	0	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	151.960.428	151.960.428	0	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.120.000	131.950.600	(4.169.400)	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.080.000	66.080.000	0	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	66.080.000	66.080.000	0	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	66.080.000	66.080.000	0	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.540.000	45.110.000	(7.430.000)	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	52.540.000	45.110.000	(7.430.000)	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	52.540.000	45.110.000	(7.430.000)	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.500.000	20.760.600	3.260.600	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	17.500.000	20.760.600	3.260.600	
2	18	2.07.2.18.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	17.500.000	20.760.600	3.260.600	
Jumlah Belanja											4.386.595.478	4.720.140.278	333.544.800	
Total Surplus/(Defisit)											(4.386.595.478)	(4.720.140.278)	(333.544.800)	
0	00	2.07.2.18.0.00.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN  
Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	05	0.00	00					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	30.904.000	15.084.000	(15.820.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	05	2.01	00					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	30.904.000	15.084.000	(15.820.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	05	2.01	01					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	30.904.000	15.084.000	(15.820.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	05	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	30.904.000	15.084.000	(15.820.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	05	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	30.904.000	15.084.000	(15.820.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	07	0.00	00					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	109.850.950	36.215.950	(73.635.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	07	2.01	00					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	109.850.950	36.215.950	(73.635.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	07	2.01	02					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	45.200.950	24.100.950	(21.100.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	07	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	41.450.000	20.350.000	(21.100.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	07	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	41.450.000	20.350.000	(21.100.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	07	2.01	02	5	2			BELANJA MODAL	3.750.950	3.750.950	0	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	07	2.01	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.750.950	3.750.950	0	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	07	2.01	03					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	64.650.000	12.115.000	(52.535.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	07	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	64.650.000	12.115.000	(52.535.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.00	07	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	64.650.000	12.115.000	(52.535.000)	
Jumlah Belanja											11.958.374.428	11.478.622.339	(479.752.089)	
Total Surplus/(Defisit)											(11.585.374.428)	(11.120.552.339)	464.822.089	
0	00	2.09.3.25.3.27.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.633.600	160.473.600	(4.160.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	164.633.600	160.473.600	(4.160.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	164.633.600	160.473.600	(4.160.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.624.000	144.124.000	4.500.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.034.000	83.034.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	83.034.000	83.034.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	83.034.000	83.034.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.590.000	61.090.000	4.500.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	56.590.000	61.090.000	4.500.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	56.590.000	61.090.000	4.500.000	
Jumlah Belanja											4.395.128.234	4.408.688.309	13.560.075	
Total Surplus/(Defisit)											(4.395.128.234)	(4.408.688.309)	(13.560.075)	
0	00	2.12.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA



Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	5	1			BELANJA OPERASI	39.908.000	39.908.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	39.908.000	39.908.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.253.500	68.753.500	7.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	61.253.500	68.753.500	7.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	61.253.500	68.753.500	7.500.000	
Jumlah Belanja											8.701.995.292	8.439.068.151	(262.927.141)	
Total Surplus/(Defisit)											(6.710.395.292)	(5.997.468.151)	712.927.141	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang

FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	21	2.16.2.21.2.20.01.00	02	2.01	02					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.800.000	9.900.000	(2.900.000)	
2	21	2.16.2.21.2.20.01.00	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	12.800.000	9.900.000	(2.900.000)	
2	21	2.16.2.21.2.20.01.00	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.800.000	9.900.000	(2.900.000)	
Jumlah Belanja											7.996.091.026	9.283.181.978	1.287.090.952	
Total Surplus/(Defisit)											(7.771.091.026)	(9.208.181.978)	(1.437.090.952)	
0	00	2.16.2.21.2.20.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang

FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	2.17.3.30.3.31.01.00	06	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	133.422.050	133.421.450	(600)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.00	07	0.00	00					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	442.437.700	368.247.700	(74.190.000)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.00	07	2.01	00					Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	442.437.700	368.247.700	(74.190.000)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.00	07	2.01	01					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	345.166.500	273.136.500	(72.030.000)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.00	07	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	345.166.500	273.136.500	(72.030.000)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.00	07	2.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.580.000	0	(2.580.000)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.00	07	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	342.586.500	273.136.500	(69.450.000)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.00	07	2.01	02					Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	97.271.200	95.111.200	(2.160.000)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.00	07	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	97.271.200	95.111.200	(2.160.000)	
3	30	2.17.3.30.3.31.01.00	07	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	97.271.200	95.111.200	(2.160.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.00	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	313.895.803	229.345.803	(84.550.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.00	02	0.00	00					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	313.895.803	229.345.803	(84.550.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.00	02	2.01	00					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	313.895.803	229.345.803	(84.550.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.00	02	2.01	03					Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	313.895.803	229.345.803	(84.550.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.00	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	313.895.803	229.345.803	(84.550.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.01.00	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	313.895.803	229.345.803	(84.550.000)	
Jumlah Belanja											17.903.082.248	17.294.695.648	(608.386.600)	
Total Surplus/(Defisit)											(13.751.082.248)	(14.404.195.648)	(653.113.400)	
0	00	2.17.3.30.3.31.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
ADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN  
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Total Surplus/(Defisit)											(5.700.814.322)	(5.180.189.427)	520.624.895	
0	00	2.23.2.24.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Kode Rekening										Uralan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	03	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	125.000.000	155.210.000	30.210.000	
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	03	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	155.210.000	30.210.000	
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	05	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	50.000.000	666.119.750	616.119.750	
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	05	2.01	00					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50.000.000	666.119.750	616.119.750	
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	05	2.01	01					Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0	492.896.050	492.896.050	
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	05	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	0	492.896.050	492.896.050	
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	05	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	492.896.050	492.896.050	
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	05	2.01	02					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50.000.000	173.223.700	123.223.700	
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	05	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	50.000.000	173.223.700	123.223.700	
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	05	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	123.223.700	123.223.700	
3	26	2.19.3.26.0.00.01.00	05	2.01	02	5	1	05		Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	0	
Jumlah Belanja											38.912.323.750	39.730.643.900	818.320.150	
Total Surplus/(Defisit)											(38.432.323.750)	(39.250.643.900)	(818.320.150)	
0	00	2.19.3.26.0.00.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	00					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	541.783.400	692.028.000	150.244.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	01					Fasilitasi Keprotokolan	334.149.200	391.018.000	56.868.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	01	5	1			BELANJA OPERASI	334.149.200	391.018.000	56.868.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	334.149.200	391.018.000	56.868.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	02					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	47.635.000	87.575.000	39.940.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	02	5	1			BELANJA OPERASI	47.635.000	87.575.000	39.940.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.635.000	87.575.000	39.940.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	03					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	159.999.200	213.435.000	53.435.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	03	5	1			BELANJA OPERASI	159.999.200	213.435.000	53.435.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	159.999.200	213.435.000	53.435.800	
Jumlah Belanja											52.533.484.460	55.084.898.850	2.551.414.390	
Total Surplus/(Defisit)											(52.116.484.460)	(54.694.898.850)	(2.578.414.390)	
0	00	4.01.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
RADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG												
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021												
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD												
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD												
Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	01	5	1	BELANJA OPERASI	88.600.000	100.850.000	12.250.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.600.000	100.850.000	12.250.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	530.592.000	102.792.000	(427.800.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	5	1	BELANJA OPERASI	530.592.000	102.792.000	(427.800.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	530.592.000	102.792.000	(427.800.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	805.060.475	642.601.375	(162.459.100)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	1	BELANJA OPERASI	770.060.475	612.601.375	(157.459.100)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	770.060.475	612.601.375	(157.459.100)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	2	BELANJA MODAL	35.000.000	30.000.000	(5.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000	30.000.000	(5.000.000)	
Jumlah Belanja									32.720.142.147	37.824.245.777	5.104.103.630	
Total Surplus/(Defisit)									(32.720.142.147)	(37.824.245.777)	(5.104.103.630)	
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
RADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN  
Organisasi : 5.01.5.05.1.04.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	05	5.01.5.05.1.04.01.00	02	2.04	01	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	50.137.700	50.137.700	
Jumlah Belanja											6.646.552.210	6.418.678.560	(227.873.650)	
Total Surplus/(Defisit)											(6.646.552.210)	(6.418.678.560)	227.873.650	
0	00	5.01.5.05.1.04.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA



Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN  
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	581.166.400	581.166.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.368.000	399.213.000	11.845.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.948.000	272.798.000	(150.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	272.948.000	272.798.000	(150.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	272.948.000	272.798.000	(150.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	66.995.000	11.995.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	55.000.000	66.995.000	11.995.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	66.995.000	11.995.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.420.000	59.420.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	59.420.000	59.420.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	59.420.000	59.420.000	0	
Jumlah Belanja											15.789.039.710	17.325.777.150	1.536.737.440	
Total Surplus/(Defisit)											497.676.320.826	486.141.799.689	(11.534.521.137)	
0	00	5.02.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00	6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000	50.810.925.556	23.810.925.556	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00	6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.000.000.000	50.810.925.556	23.810.925.556	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											27.000.000.000	50.810.925.556	23.810.925.556	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00	6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00	6	2	02		Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
PADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN  
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	00	0.00	00					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	852.491.950	612.478.950	(240.013.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	852.491.950	612.478.950	(240.013.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	00					Pengembangan Kompetensi Teknis	436.707.950	368.345.950	(68.362.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	03					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	436.707.950	368.345.950	(68.362.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	436.707.950	368.345.950	(68.362.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	436.707.950	368.345.950	(68.362.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02	00					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	415.784.000	244.133.000	(171.651.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02	07					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	415.784.000	244.133.000	(171.651.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	415.784.000	244.133.000	(171.651.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	415.784.000	244.133.000	(171.651.000)	
Jumlah Belanja											13.929.407.144	12.202.298.845	(1.727.108.299)	
Total Surplus/(Defisit)											(13.929.407.144)	(12.202.298.845)	1.727.108.299	
0	00	5.03.5.04.0.00.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

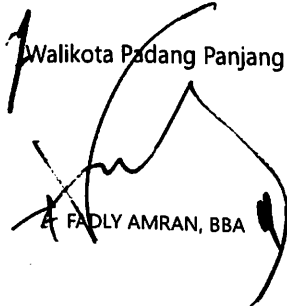
Walikota Padang Panjang  
ADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH  
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.875.400	174.606.000	42.730.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.991.400	124.014.000	22.022.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	101.991.400	124.014.000	22.022.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	101.991.400	124.014.000	22.022.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.884.000	50.592.000	20.708.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	29.884.000	50.592.000	20.708.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	29.884.000	50.592.000	20.708.000	
Jumlah Belanja											5.671.320.838	6.008.977.538	337.656.700	
Total Surplus/(Defisit)											(5.671.320.838)	(6.008.977.538)	(337.656.700)	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
  
FADLY AMRAN, BBA



Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Belanja		18.947.967.244	18.568.809.012	(379.158.232)	
Total Surplus/(Defisit)		(18.947.967.244)	(18.568.809.012)	379.158.232	
0007.01.0.00.0.00.01.000000006	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
RADLY AMRAN, BBA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	04	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	69.970.500	471.645.700	401.675.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	0.00	00					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	91.250.000	73.180.000	(18.070.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01	00					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	91.250.000	73.180.000	(18.070.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01	04					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	77.750.000	61.580.000	(16.170.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	77.750.000	61.580.000	(16.170.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	77.750.000	61.580.000	(16.170.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01	08					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.500.000	11.600.000	(1.900.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01	08	5	1			BELANJA OPERASI	13.500.000	11.600.000	(1.900.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	11.600.000	(1.900.000)	
Jumlah Belanja											19.507.782.934	19.995.527.058	487.744.124	
Total Surplus/(Defisit)											(19.507.782.934)	(19.995.527.058)	(487.744.124)	
0	00	7.01.0.00.0.00.02.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang  
ADLY AMRAN, BBA

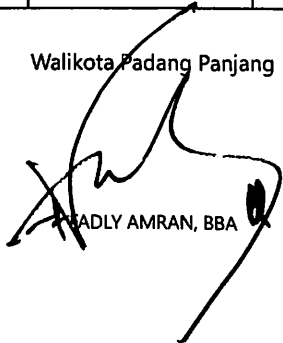
Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	06	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	365.960.000	310.163.200	(55.796.800)	
8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	06	2.01	00					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	365.960.000	310.163.200	(55.796.800)	
8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	06	2.01	04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	365.960.000	310.163.200	(55.796.800)	
8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	365.960.000	310.163.200	(55.796.800)	
8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	365.960.000	310.163.200	(55.796.800)	
Jumlah Belanja											7.673.286.768	8.479.702.448	806.415.680	
Total Surplus/(Defisit)											(7.673.286.768)	(8.479.702.448)	(806.415.680)	
0	00	8.01.1.05.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Walikota Padang Panjang

  
ADLY AMRAN, BBA



8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	53.400.000	0	0	0	53.400.000	53.400.000	0	0	0	53.400.000	0
8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	365.960.000	0	0	0	365.960.000	310.163.200	0	0	0	310.163.200	(55.796.800)
8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	365.960.000	0	0	0	365.960.000	310.163.200	0	0	0	310.163.200	(55.796.800)
8	01	8.01.1.05.0.00.01.0000	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	365.960.000	0	0	0	365.960.000	310.163.200	0	0	0	310.163.200	(55.796.800)
<b>TOTAL</b>							<b>537.299.563.908</b>	<b>70.002.796.628</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>609.302.360.536</b>	<b>545.249.924.177</b>	<b>72.443.248.218</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>622.193.172.395</b>	<b>12.890.811.859</b>

Walikota Padang Panjang

ADLY AMRAN, BBA

07	02	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.809.024.608	187.340.000	0	0	1.996.364.608	1.832.954.950	196.340.000	0	0	2.029.294.950	32.930.342
08				<b>PARIWISATA</b>											
08	01	3	26	Pariwisata	829.163.338	2.275.950.000	0	0	3.105.113.338	1.935.833.158	2.390.185.850	0	0	4.326.019.008	1.220.905.670
10				<b>PENDIDIKAN</b>											
10	01	1	01	Pendidikan	20.329.466.641	10.101.682.780	0	0	30.431.149.421	21.216.579.046	11.508.325.677	0	0	32.724.904.723	2.293.755.302
10	02	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	7.804.638.300	21.381.987.112	0	0	29.186.625.412	8.088.096.000	21.716.077.662	0	0	29.804.173.662	617.548.250
10	03	2	22	Kebudayaan	81.255.000	0	0	0	81.255.000	161.255.000	0	0	0	161.255.000	80.000.000
10	04	2	23	Perpustakaan	1.393.739.050	0	0	0	1.393.739.050	856.620.050	8.000.000	0	0	864.620.050	(529.119.000)
11				<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>											
11	01	1	06	Sosial	2.618.545.690	33.796.500	0	0	2.652.342.190	2.423.000.350	67.003.050	0	0	2.490.003.400	(162.338.790)
11	02	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	380.000.000	0	0	0	380.000.000	402.780.900	0	0	0	402.780.900	22.780.900
<b>TOTAL</b>					<b>536.153.481.048</b>	<b>69.333.221.628</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>607.486.702.676</b>	<b>545.249.924.177</b>	<b>72.443.248.218</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>622.193.172.395</b>	<b>14.706.469.719</b>

*F* Walikota Padang Panjang

*F* FADLY AMRAN, BBA

*Ag*



Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			837.828.100	814.983.100	(22.845.000)
	Jumlah SPM Bidang Sosial			837.828.100	814.983.100	(22.845.000)

Walikota Padang Panjang

ADLY AMRAN, BBA

	F SPM Bidang Sosial			
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Penyediaan Permakanan	454.178.600	440.428.600
		Penyediaan Sandang	218.040.000	213.240.000
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	165.609.500	161.314.500
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		837.828.100	814.983.100
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti		837.828.100	814.983.100
	Jumlah SPM Bidang Sosial		837.828.100	814.983.100

Catatan : Untuk Perkim memang tidak ada keluar pada laporan SIPD maka dibuat manual saja

Walikota Padang Panjang,

FADLY AMRAN

5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	644.504.550	1.041.871.550	1.039.781.550	(2.090.000)	(0,00)
5.03	KEPEGAWAIAN	13.076.915.194	12.901.824.444	11.589.945.895	(1.311.878.549)	(0,10)
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.732.738.994	11.766.666.344	10.454.787.795	(1.311.878.549)	(0,11)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.344.176.200	1.135.158.100	1.135.158.100	-	-
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	852.491.950	612.478.950	612.478.950	-	-
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	852.491.950	612.478.950	612.478.950	-	-
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	289.859.000	209.875.000	209.873.000	(2.000)	(0,00)
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	289.859.000	209.875.000	209.873.000	(2.000)	(0,00)
6	UNSUR PENGAWAS					
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	5.671.320.838	5.800.332.058	5.979.204.338	178.872.280	0,03
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.793.003.938	5.085.976.108	5.264.848.388	178.872.280	0,04
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	488.673.000	434.499.850	434.499.850	-	-
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	389.643.900	279.856.100	279.856.100	-	-
7	UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN	38.455.750.178	38.353.502.230	38.512.394.317	158.892.087	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.690.844.600	22.895.345.780	23.070.685.517	175.339.737	0,01
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.404.829.750	5.480.482.550	5.467.458.750	(13.023.800)	(0,00)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.080.565.378	8.941.887.000	8.972.313.450	30.426.450	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111.920.500	920.364.400	886.514.100	(33.850.300)	(0,04)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	167.589.950	115.422.500	115.422.500	-	-
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.489.152.320	6.615.095.830	6.802.110.830	187.015.000	0,03
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.905.657.090	4.477.118.100	4.474.452.600	(2.665.500)	(0,00)
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.164.135.230	1.774.335.230	1.964.095.030	189.759.800	0,11
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	53.400.000	53.400.000	53.400.000	-	-
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	365.960.000	310.242.500	310.163.200	(79.300)	(0,00)
1.05	URUSAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH	1.184.134.448	1.678.597.368	1.667.597.368	(11.000.000)	(0,01)
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.184.134.448	1.678.597.368	1.667.597.368	(11.000.000)	(0,01)
	<b>TOTAL</b>	<b>609.302.360.536</b>	<b>615.312.201.598</b>	<b>622.193.172.095</b>	<b>6.880.970.497</b>	<b>0,01</b>

Walikota Padang Panjang

Fadly Amran, BBA

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS  
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.1.05.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	53.400.000	53.400.000	53.400.000
8.01.1.05.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	310.242.500	310.242.500	310.163.200
8.01.1.05.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	310.242.500	310.242.500	310.163.200
8.01.1.05.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	310.242.500	310.242.500	310.163.200

Walikota Padang Panjang

FADLY AMRAN, BBA

KOTA PADANG PANJANG  
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	1	0	2
Golongan IV/c	0	16	0	0	0	10	0	26
Golongan IV/b	0	8	31	0	0	35	1	75
Golongan IV/a	0	0	39	22	0	168	5	234
JUMLAH GOLONGAN IV	0	25	70	22	0	214	6	337
Golongan III/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan III/d	0	0	19	169	0	138	33	359
Golongan III/c	0	0	5	98	0	202	30	335
Golongan III/b	0	0	0	44	0	174	128	346
Golongan III/a	0	0	0	11	0	60	186	257
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	24	322	0	574	377	1297
Golongan II/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan II/d	0	0	0	0	0	16	119	135
Golongan II/c	0	0	0	0	0	32	93	125
Golongan II/b	0	0	0	0	0	0	33	33
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	10	10
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	48	255	303
Golongan I/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	11	11
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	2	2
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	13	13
TOTAL	0	25	94	344	0	836	651	1950

Walikota Padang Panjang  
FADLY AMRAN, BBA

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
C	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	A.2.c.				
	Belanja Tak Terduga	A.2.c.	32.988.622.442,00	25.539.205.763,00	77,42	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga		32.988.622.442,00	25.539.205.763,00	77,42	-
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		592.734.340.696,43	543.352.682.379,84	91,67	599.638.333.339,32
III	<b>TRANSFER</b>	A.3.				
	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	A.3.				
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	A.3.a	653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	565.929.412,00
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	565.929.412,00
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>		653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	565.929.412,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		593.388.193.076,43	544.006.534.759,84	91,68	600.204.262.751,32
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		(47.042.557.619,77)	3.768.367.936,22	(8,01)	(21.867.123.803,83)
IV	<b>PEMBIAYAAN</b>	A.4				
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	A.4.a.				
	Penggunaan SILPA	A.4.a.	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	68.909.681.423,60
	Jumlah Penerimaan		47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	68.909.681.423,60
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	A.4.b.	-	-	-	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	A.4.b.	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	A.4.c.	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	68.909.681.423,60
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	A.4.d	-	50.810.925.555,99	-	47.042.557.619,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

LAPORAN KEUANGAN POKOK

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
I	PENDAPATAN - LRA	A.1				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	A.1.a.				
	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	A.1.a.1).	7.067.350.000,00	7.826.867.948,00	110,75	9.048.892.175,00
	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	A.1.a.2).	4.389.233.520,00	4.656.919.048,15	106,10	4.624.073.616,67
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	A.1.a.3).	6.313.227.292,00	6.313.227.292,00	100,00	6.058.783.025,00
	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	A.1.a.4).	49.411.210.286,66	60.631.788.407,91	122,71	57.591.401.639,82
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		67.181.021.098,66	79.428.802.696,06	118,23	77.323.150.456,49
B	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	A.1.b.				
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	A.1.b.1).				
	Dana bagi hasil pajak	A.1.b.1.1).	9.873.261.550,00	8.033.525.138,00	81,37	6.534.490.997,00
	Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam	A.1.b.1.2).	2.816.684.569,00	1.948.433.875,00	69,17	1.824.173.950,00
	Dana Alokasi Umum	A.1.b.1.3).	354.367.009.000,00	352.753.271.000,00	99,54	390.319.648.000,00
	Dana Alokasi Khusus	A.1.b.1.4).	55.791.027.768,00	49.972.658.041,00	89,57	54.407.609.651,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA		422.847.982.887,00	412.707.888.054,00	97,60	453.085.922.598,00
	2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	A.1.b.2).				
	Dana Penyesuaian	A.1.b.2.1).	27.961.238.000,00	27.961.238.000,00	100,00	17.241.091.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		27.961.238.000,00	27.961.238.000,00	100,00	17.241.091.000,00
	3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	A.1.b.3).				
	Pendapatan bagi hasil pajak	A.1.b.3.1).	20.400.193.471,00	19.924.523.946,00	97,67	22.524.774.893,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		20.400.193.471,00	19.924.523.946,00	97,67	22.524.774.893,00
	4. Bantuan keuangan					
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah propinsi lainnya					
	Jumlah Bantuan keuangan					
	Jumlah Pendapatan Transfer		471.209.414.358,00	460.593.650.000,00	97,75	492.851.788.491,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	A.1.c.				
	1. Pendapatan Hibah-LRA	A.1.c.1).				
	Pendapatan hibah Dana BOS	A.1.c.1.1).	7.955.200.000,00	7.752.450.000,00	97,45	8.162.200.000,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		7.955.200.000,00	7.752.450.000,00	97,45	8.162.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		546.345.635.456,66	547.774.902.696,06	100,26	578.337.138.947,49
II	BELANJA	A.2				
A	BELANJA OPERASI	A.2.a.				
	Belanja Pegawai	A.2.a.1).	260.447.447.190,71	243.421.203.426,00	93,46	256.801.711.815,00
	Belanja Barang dan Jasa	A.2.a.2).	233.248.586.435,65	216.466.466.427,97	92,81	237.099.834.485,35
	Belanja Hibah	A.2.a.3).	3.255.520.000,00	2.887.795.179,00	88,70	5.253.694.572,00
	Belanja Bantuan Sosial	A.2.a.4).	961.464.000,00	434.421.800,00	45,18	2.294.310.919,00
	Jumlah Belanja Operasi		497.913.017.626,36	463.209.886.832,97	93,03	501.449.551.791,35
B	BELANJA MODAL	A.2.b.				
	Belanja Modal Tanah	A.2.b.1).	17.811.014.260,00	17.466.718.833,00	98,07	24.610.900,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.2.b.2).	20.305.519.399,00	16.850.495.356,30	82,98	24.831.522.321,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A.2.b.3).	8.395.817.788,07	7.663.481.704,67	91,28	30.067.237.581,88
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.b.4).	10.209.606.775,00	8.201.107.926,89	80,33	38.797.005.337,34
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	A.2.b.5).	4.894.042.406,00	4.211.260.463,01	86,05	4.468.405.407,75
	Belanja Modal Aset Lainnya	A.2.b.6).	216.700.000,00	210.525.500,00	97,15	-
	Jumlah Belanja Modal		61.832.700.628,07	54.603.589.783,87	88,31	98.188.781.547,97

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang  
 Nomor : 3 Tahun 2021  
 Tanggal : 29 Oktober 2021

KOTA PADANG PANJANG  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

1	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											
Jumlah											

NIHIL

 Wali Kota Padang Panjang

FADLY AMRAN, BBA 

